



ANALISIS PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN PADA UMKM DI KOTA MATARAM

Oleh

Desi Suryati¹⁾ & Baiq Salkiah²⁾

^{1,2}Universitas Nahdatul Wathan Mataram

Email : ¹desisurytiunw@gmail.com & ²baiq_salkiah@yahoo.com

Abstrak

Peranan UMKM terutama sejak krisis moneter tahun 1997 dapat dipandang sebagai media penyelamat dalam proses pemulihan ekonomi nasional. Selain sebagai salah satu alternatif penyediaan lapangan kerja baru, UMKM berperan baik dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan sebagai program pengentasan kemiskinan maupun penyerapan tenaga kerja. UMKM sangat berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. UMKM dapat menyerap banyak tenaga kerja yang masih menganggur, selain itu mereka juga memanfaatkan berbagai sumber daya alam yang potensial di suatu daerah yang belum diolah secara komersial. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu berupa data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian maka capaian pada masing-masing program berdasarkan data yang diperoleh, pada Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM pada tahun 2018 rata-rata mencapai 100%. Ini menunjukkan bahwa program yang dijalankan pada dinas perindustrian, koperasi dan UMKM memenuhi target yang ingin dicapai. Sebagai OPD yang menjalankan program pemberdayaan ekonomi kerakyatan, Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM dihadapkan pada permasalahan seperti jenis usaha yang dijalankan oleh UMKM. Munculnya permasalahan ini disebabkan oleh pola pikir masyarakat yang selalu mengikuti trend sehingga memudahkan mereka untuk mengganti jenis usahanya menjadi berbeda dari jenis usaha yang dilaporkan sebelumnya. Selain itu penyebab permasalahan yang lainnya adalah karena kurangnya pemahaman pelaku usaha pada penyerapan dan penggunaan IT secara maksimal akibatnya mengandalkan sistem penjualan yang masih bersifat konvensional. Berangkat dari permasalahan ini maka strategi yang dilakukan adalah dengan melakukan pendekatan analisa perilaku konsumen dan permintaan pasar, Sosialisasi, memaksimalkan pelaksanaan bimtek baik untuk kemudahan dalam mendapatkan modal usaha bagi UMKM maupun bimtek penggunaan IT secara maksimal. Serta memberikan pemahaman bahwa masyarakat sadar ada sebuah lembaga yang mampu memfollow-up usaha yang dijalankannya agar menjadi berkembang dan mandiri. Strategi pelaksanaan dapat dilakukan melalui mekanisme yang dilakukan dalam tahapan (1) Melakukan pemetaan potensi, pendataan dan kebutuhan masyarakat di 6 kecamatan yang ada di Kota Mataram untuk memperoleh gambaran jumlah UMKM yang belum berkembang, yang membutuhkan pembinaan dan keterampilan serta pembinaan kebutuhan akses modal. Pendataan ini berfungsi untuk menggali kebutuhan masyarakat sekaligus untuk mensosialisasikan keberadaan lembaga yang bisa membantu pelaksanaan pengembangan usaha bagi pengusaha kecil atau rumah tangga. (2) Hasil pendataan dapat dijadikan sebagai sasaran objek dalam pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang ada di pemerintahan daerah Kota Mataram. (3) Menyesuaikan program pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan kebutuhan masyarakat khususnya yang menjalankan usaha kecil atau UMKM.

Kata kunci : Program Pemberdayaan, Ekonomi Kerakyatan & UMKM.

PENDAHUALUAN

Program pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan salah satu program yang dijalankan oleh pemerintah NTB dalam upaya

untuk menanggulangi kemiskinan dan penyerapan lapangan kerja. Program ini dilaksanakan dalam berbagai bentuk format dan kegiatan baik yang sifatnya umum maupun

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

Open Journal Systems

Vol.13 No.12 Juli 2019



khusus. Secara umum maka akan mencakup semua kegiatan ekonomi nasional atau ditangani langsung secara nasional dan secara khusus mencakup semua kegiatan mikro yang berhubungan dengan ekonomi kerakyatan dalam hal ini berupa kegiatan usaha mikro atau UMKM. UMKM merupakan salah satu unit usaha yang mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi termasuk dalam penyerapan tenaga kerja. Usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Nusa Tenggara Barat yang menjalankan berbagai jenis usaha telah menyerap sebanyak 1,9 juta pekerja hingga 2016. Hampir 50 persen dari total jiwa penduduk NTB sekitar 4,7 juta orang terserap di sektor UMKM dan Koperasi sehingga program pemberdayaan ekonomi kerakyatan sangat diperlukan. Jumlah UMKM yang tersebar di 10 kabupaten/kota sebanyak 644.708 unit dengan jumlah pekerja yang terserap sebanyak 1.869.740 orang. (Dinas koperasi dan UMKM Provinsi NTB).

Peranan UMKM terutama sejak krisis moneter tahun 1997 dapat dipandang sebagai media penyelamat dalam proses pemulihan ekonomi nasional. Selain sebagai salah satu alternatif penyediaan lapangan kerja baru, UMKM berperan baik dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan sebagai program pengentasan kemiskinan maupun penyerapan tenaga kerja. UMKM merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif perorangan. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa UMKM hanya menggunakan pihak-pihak tertentu saja. Padahal sebenarnya UMKM sangat berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. UMKM dapat menyerap banyak tenaga kerja yang masih menganggur, selain itu mereka juga memanfaatkan berbagai sumber daya alam yang potensial di suatu daerah yang belum diolah secara komersial. (Budi, 2011). Untuk lebih jelasnya data UMKM Kota Mataram dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Perkembangan UMKM Kota Mataram Tahun 2014 – 2018

NO	KECAMATAN	TAHUN				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Ampenan	364	832	411	562	914
2	Cakranegara	389	883	481	483	750
3	Mataram	965	1.170	288	650	781
4	Sandubaya	347	802	524	502	765
5	Sekarbela	268	754	528	454	415
6	Selaparang	469	847	560	507	845
JUMLAH		2.802	5.288	2.792	3.158	4.470

Sumber : Dinas Perindustrian dan Koperasi dan UMKM Kota Mataram

Tabel diatas menunjukkan perkembangan UMKM di Kota Mataram terus mengalami peningkatan, dimana dalam kurun waktu 5 (lim) tahun mengalami perkembangan dari 2.802 unit usaha pada tahun 2014, menjadi 4.470 unit usaha pada tahun 2018. Selama 5 (lima) tahun mengalami pertumbuhan mencapai 59,53%, hal ini menunjukkan bahwa minat usaha serta peluang berusaha di Kota Mataram relative tinggi.

Sayangnya minat berusaha pelaku UMKM yang tinggi sebagaimana disebut diatas, tidak disertai dengan tumbuhnya animo membuat legalitas usaha, berdasarkan data terakhir tahun 2018, jumlah UMKM yang telah mengantongi ijin usaha dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. UMKM yang memiliki Ijin Usaha Tahun 2018

No	Kecamatan	Jumlah		
		UMKM	Ijin Usaha	Ijin Usaha (%)
1	Ampenan	914	102	11.16
2	Cakranegara	750	116	15.47
3	Mataram	781	56	7.17
4	Sandubaya	765	49	6.41
5	Sekarbela	415	125	30.12
6	Selaparang	845	17	2.01
Jumlah		4.470	465	

Sumber : Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kota Mataram

Data diatas menunjukkan bahwa UMKM yang memiliki ijin usaha masih relative sedikit yaitu hanya mencapai 465 unit usaha atau 12,06 persen dibandingkan dengan banyaknya UMKM yang ada di Kota Mataram pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa gairah pelaku UMKM untuk membuat legalitas usaha masih relative rendah, padahal upaya pemerintah Kota Mataram mendorong pelaku usaha untuk membuat ijin usaha begitu gencar. Permasalahan lain yang ditemui di lapangan bahwa Pelaku UMKM,



mengalami kendala pada permodalan yang lebih dominan. Disamping itu juga masalah perluasan jaringan usaha akibat pasarnya yang masih lokal dan konvensional sehingga hal ini menghambat ruang gerak UMKM dalam memperluas pasar dan jaringan usahanya.

Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Mataram, secara rutin melaksanakan penguatan UMKM melalui program/kegiatan berupa (1) Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM/Standarisasi dan Legalitas Usaha UMKM terdiri dari kegiatan Bimtek Kemitraan, Bimtek Persiapan Label Halal, Bimtek PIRT, dan Sosialisasi PP 23 Tahun 2018. (2) Penciptaan iklim usaha UKM yang kondusif/Pengembangan UMKM terdiri dari kegiatan Bimtek pengembangan UKM dengan pelaku usaha, Bimtek Pengelolaan Permodalan UKM, Bimtek Manajemen Usaha dan Magang Bagi UKM. (3) Program Bimtek PIRT yaitu targetnya adalah untuk Meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM tentang tata cara pengolahan pangan yang baik sehingga dapat meningkatkan nilai jual produk dan bisa menembus pangsa pasar di Kota Mataram maupun luar daerah.

Program pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang dilaksanakan oleh pemerintah kota mataram sudah dimaksimalkan dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring dalam rentang waktu yang berkesinambungan, ditengah gencarnya upaya pemerintah daerah melalui program pemberdayaan ekonomi kerakyatan belum mampu merubah kondisi UMKM menjadi lebih berdaya, maju dan mandiri sehingga dapat menjadi salah satu unsur yang diharapkan memberi dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Mataram.

LANDASAN TEORI

Pemberdayaan

Mahidin (2006), mengemukakan bahwa pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan seseorang atau kelompok sehingga mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana tuntutan kinerja tugas tersebut. Pemberdayaan

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

Open Journal Systems

merupakan proses yang dapat dilakukan melalui berbagai upaya, seperti pemberian wewenang, meningkatkan partisipasi, memberikan kepercayaan sehingga setiap orang atau kelompok dapat memahami apa yang akan dikerjakannya, yang pada akhirnya akan berimplikasi pada peningkatan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.

Keberdayaan masyarakat merupakan unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat itu sendiri menjadi sumber dari apa yang di dalam wawasan politik disebut sebagai ketahanan nasional. Artinya apabila masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang tinggi, maka hal tersebut merupakan bagian dari ketahanan ekonomi nasional (Rukminto, 2008).

1. Ekonomi Kerakyatan

Menurut Mubaryo, dalam bukunya yang berjudul : Reformasi Sistem Ekonomi (dari Kapitalis Menuju Ekonomi Kerakyatan), menyatakan bahwa ekonomi kerakyatan adalah ekonomi yang demokratis yang ditujukan untuk kemakmuran rakyat kecil. Sementara Ekonomi kerakyatan menurut Zulkarnain, di dalam bukunya yang berjudul: Kewirausahaan (Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah dan penduduk Miskin), ekonomi kerakyatan adalah suatu sistem ekonomi yang harus di anut sesuai dengan falsafah negara kita yang menyangkut dua aspek, yakni keadilan dan demokrasi ekonomi, serta keberpihakan kepada ekonomi rakyat.

Sedangkan menurut A. Simarmata Istilah demokrasi ekonomi yang secara tegas terdapat pasal penjelasan, dapat ditafsirkan sebagai setara dengan ekonomi kerakyatan. Penjelasan pasal 33 UUD 45 menyatakan bahwa ekonomi kerakyatan yakni sistem ekonomi dimana produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, serta dibawah pemilikan anggota-anggota masyarakat. Dengan demikian salah satu pilar dari demokrasi ekonomi itu adalah keikutsertaan semua orang dalam kegiatan produksi.



Pemahaman tentang ekonomi rakyat dapat dipandang dari dua pendekatan yaitu: pertama, pendekatan kegiatan ekonomi dari pelaku ekonomi berskala kecil, yang disebut perekonomian rakyat. Berdasarkan pendekatan ini, pemberdayaan ekonomi rakyat dimaksudkan adalah pemberdayaan pelaku ekonomi skala kecil. Kedua, pendekatan sistem ekonomi, yaitu demokrasi ekonomi atau system pembangunan yang demokratis, disebut pembangunan partisipatif (*participatory development*).

Berdasarkan pengertian di atas, maka ekonomi kerakyatan adalah perkembangan ekonomi kelompok masyarakat yang mengikut sertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan yang berkaitan erat dengan aspek keadilan, demokrasi ekonomi, keberpihakan pada ekonomi rakyat yang bertumpu pada mekanisme pasar yang adil dan mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan, serta berperilaku adil bagi seluruh masyarakat, dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan atau mayoritas masyarakat.

Ciri-Ciri Ekonomi Kerakyatan

Soeharto Prawiro Kusumo, mengemukakan beberapa ciri dan prinsip yang terdapat dalam konsep demokrasi ekonomi/ekonomi kerakyatan. Adapun Ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Ciri utama sistem demokrasi ekonomi atau ekonomi kerakyatan adalah penegakan prinsip keadilan disertai kepedulian terhadap yang lemah. Sistem ekonomi tersebut harus memungkinkan seluruh potensi bangsa, baik sebagai konsumen, pengusaha, ataupun sebagai tenaga kerja, Tanpa perlindungan dan hak untuk memajukan kemampuannya dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya dan partisipasinya secara aktif dalam berbagai kegiatan ekonomi, termasuk dalam memelihara kekayaan alam dan lingkungan hidup. Didalam melaksanakan kegiatan tersebut, semua

pihak harus mengacu kepada peraturan yang berlaku.

- b. Sejalan dengan sifat dan ciri pertama, adalah pemihakan, pemberdayaan, dan perlindungan terhadap yang lemah oleh semua potensi bangsa, terutama pemerintah sesuai dengan kemampuannya. Pemerintah melaksanakannya melalui langkah-langkah yang ramah pasar. Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi (UKM) termasuk petani dan nelayan kecil, merupakan prioritas utama dalam mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan. Bagi kelompok penduduk yang karena keadaannya mempunyai keterbatasan dilakukan langkah-langkah untuk meningkat kemampuannya dan memberikan dukungan agar dapat memmanfaatkannya akses yang terbuka.
- c. Penciptaan iklim persaingan usaha yang sehat dan intervensi yang ramah pasar. Upaya pemerataan berjalan seiring dengan upaya mnciptakan pasar yang kompetitif untuk mencapai efisiensi optimal. Dengan demikian, misalnya hubungan kemitraan antar usaha besar dan UKM harus berdasarkan kompetensi bukan belas kasihan. Untuk itu, prioritas dilakukan penghapusan praktek-praktek dan perilaku ekonomi diluar aturan permainan yang dianggap wajar dan adil oleh masyarakat seperti praktek monopoli, pengembangan dengan sistem perpajakan progresif dan deregulasi yang diarahkan untuk menghilangkan ekonomi biaya tinggi.
- d. Pemberdayaan kegiatan ekonomi rakyat sangat terkait dengan upaya menggerakkan perekonomian pedesaan. Oleh karena itu, upaya mempercepat pembangunan pedesaan, termasuk daerah terpencil, daerah minus, daerah kritis, daerah perbatasan, dan termasuk daerah terbelakglainnya harus menjadi prioritas. Hal ini dilakukan antara lain,



dengan meningkatkan pembangunan prasarana pedesaan dalam mendukung pengembangan keterkaitan desa-desa sebagai bentuk jaringan produksi dan distribusi yang saling menguntungkan.

- e. Pemanfaatan dan penggunaan tanah dan sumber daya alam lainnya, seperti hutan, laut, air, udara, dan mineral. Semuanya harus dikelola secara adil, transparan dan produktif dengan mengutamakan hak-hak rakyat setempat, termasuk hak ulayat masyarakat adat dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Prinsip

Ekonomi kerakyatan sebagai sebuah sistem sudah barang tentu mempunyai prinsip-prinsip dasar yang membedakannya dengan system ekonomi lainnya. Secara umum para pakar ekonomi belum ada menyebutkan suatu prinsip yang utuh yang menyangkut dengan demokrasi ekonomi. Hanya saja di antara prinsip yang tertuang dalam UUD 1945 terutama pasal 33 adalah Prinsip kekeluargaan, Prinsip keadilan. Prinsip pemerataan pendapatan, Prinsip keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat dan Prinsip kerja sama atau jaringan.

Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 Pasal 3 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, maka yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu:

- a. **Usaha Mikro adalah** Usaha Produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
- b. **Usaha Kecil adalah** usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah

Menurut Rudjito, pengertian UMKM adalah usaha yang punya peranan penting dalam perekonomian negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya.

Menurut M. Kwartono, pengertian UMKM adalah kegiatan ekonomi rakyat yang punya kekayaan bersih maksimal Rp 200.000.000,- dimana tana dan bangunan tempat usaha tidak diperhitungkan. Atau mereka yang punya omset penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000.000,- dan milik warga negara Indonesia.

Kriteria UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)

Untuk mengetahui jenis usaha apa yang sedang dijalankan perlu memperhatikan kriteria-kriterianya terlebih dahulu. Hal ini penting digunakan untuk pengurusan surat ijin usaha kedepannya dan juga menentukan besaran pajak yang akan dibebankan kepada pemilik UMKM.

a. Usaha Mikro

Pengertian usaha mikro diartikan sebagai usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria usaha mikro.

Usaha yang termasuk kriteria usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai Rp 50.000.000,- dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan usaha mikro setiap tahunnya paling banyak Rp 300.000.000,-

b. Usaha Kecil

Usaha kecil merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri baik yang dimiliki perorangan atau kelompok dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. Dikuasai dan dimiliki serta menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah.

Usaha yang masuk kriteria usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan



bersih Rp 50.000.000,- dengan maksimal yang dibutuhkannya mencapai Rp 500.000.000,-. Hasil penjualan bisnis setiap tahunnya antara Rp 300.000.000,- sampai paling banyak Rp 2,5.000.000.000,-.

c. Usaha Menengah

Pengertian usaha menengah adalah usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat serta menjadi bagian secara langsung maupun tak langsung terhadap usaha kecil atau usaha besar dengan total kekayaan bersihnya sesuai yang sudah diatur dengan peraturan perundang-undangan. Usaha menengah sering dikategorikan sebagai bisnis besar dengan kriteria kekayaan bersih yang dimiliki pemilik usaha mencapai lebih dari Rp500.000.000,- hingga Rp10.000.000.000,- dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan tahunannya mencapai Rp2,5 .000.000,- milyar sampai Rp50.000.000.000,-.

METODE PENELITIAN

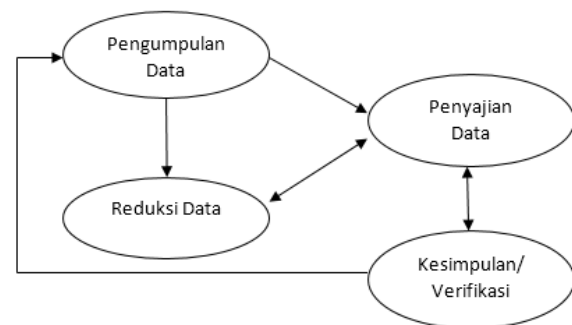
Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu berupa data primer dan data sekunder, baik kualitatif maupun kuantitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis deskriptif yaitu dengan cara mengumpulkan, mengelola, menyajikan dan menjabarkan hasil penelitian sebagaimana adanya. Data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan kemudian di kumpul, serta di olah dan di analisis dengan menggunakan tabel, grafik bahkan gambar, sehingga data dapat di baca dengan mudah untuk mengetahui jawaban yang diteliti. Desain penelitian yang bersifat deskriptif matrik, yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program pemberdayaan ekonomi kerakyatan khususnya UMKM di Kota Mataram dan sekaligus tingkat

efektivitas dan efisiensinya program pemberdayaan pada UMKM.

Metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data dan informasi yaitu metode wawancara dan observasi. Yaitu dengan mewawancarai pemberi kebijakan yaitu Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM serta pelaku UMKM . Data penelitian dikumpulkan dari hasil observasi dan interview dengan pihak-pihak terkait seperti dengan para pelaku UMKM. Responden ditentukan dengan purposive sampling dan snowball sampling dimana peneliti memilih informan yang dianggap mengetahui sumber masalahnya secara mendalam, terpercaya untuk memberikan data dan informasi yang valid. analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus. sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh

Gambar 1. Analisis Data Model Interaktif



Sumber: Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2014:247)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Mataram, ada 5 program kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan yaitu Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif dengan anggaran sebesar Rp 241.455.500, Program pengembangan industri kecil dan menengah anggarannya sebesar Rp. 754.000.000, Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah sebesar Rp. 723.689.000, Program peningkatan kemampuan teknologi industri sebesar Rp. 276.200.000, dan Program Penataan Struktur Industri sebesar Rp. 178.000.000 sehingga total anggaran Rp. 2.173.344.000.



Dana untuk pembiayaan program pemberdayaan ekonomi kerakyatan ini bersumber dari APBN yang teralokasi dalam Dana Alokasi Umum (DAU).

Sejumlah dana tersebut masing-masing dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi kerakyatan per unit khususnya untuk kegiatan UKM sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3. Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Pada Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Mataram Tahun 2018

No	PROGRAM KEGIATAN	TARGET KINERJA	SASARAN
1	Bimtek Kemitraan	Terjalinnnya kerjasama/kemitraan dengan Pihak BUMN/Perbankan untuk Pengembangan dan peningkatan akses UKM	30 UMKM yang ada di 6 Kecamatan
2	Bimtek PIRT	Meningkatkan pengetahuan pelaku UKM tentang tata cara pengolahan pangan yang baik sehingga dapat meningkatkan nilai jual produk dan bisa menembus pangsa pasar dalam daerah maupun luar daerah	30 UMKM yang ada di 6 Kecamatan
3	Bimtek Pengembangan UKM dengan Pelaku Usaha	Meningkatkan nilai jual produk dan kemampuan UKM dalam pengembangan usahanya	30 UMKM yang ada di 6 Kecamatan
4	Bimtek Pengelolaan Permodalan UKM	Terjalinnnya kemitraan dengan pihak BUMN untuk mempermudah dalam proses pengaksesan modal usaha bagi UKM	30 UMKM yang ada di 6 Kecamatan
5	Bimtek Manajemen Usaha	Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pelaku UKM tentang tata cara manajemen usaha untuk pengembangan dan peningkatan usahanya	30 UMKM yang ada di 6 Kecamatan
6	Magang ke luar daerah	Meningkatkan wawasan dan pengetahuan dari pelaku usaha yang ada di daerah lain untuk pengembangan usahanya	10 orang UMKM
7	Bimtek Kewirausahaan	Menjalain kerjasama dengan pasar/retail modern	30 UMKM yang ada di 6 Kecamatan
8	Pameran/Promosi Bantuan Modal Awal Sebesar Rp. 13.000.000,-	Memperkenalkan produk UKM agar dapat menembus pangsa pasar dalam dan luar daerah Bantuan Modal Wira Usaha Baru	12 orang peserta 3 orang UMKM
9	Bantuan Modal masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- bagi 20 UMKM	Peningkatan ,pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro dan kecil	20 orang UMKM

Sumber : Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kota Mataram

Berdasarkan data diatas maka kegiatan yang terdapat pada dinas Perindustrian, koperasi dan UMKM Kota Mataram disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang ada di Kota Mataram seperti Bimtek Kemitraan, Bimtek PIRT, Bimtek Pengembangan UKM dengan Pelaku Usaha, Bimtek Pengelolaan Permodalan UKM, Bimtek Manajemen Usaha, Magang ke luar daerah, Bimtek Kewirausahaan, Pameran/Promosi Bantuan Modal Awal Sebesar Rp. 13.000.000,- serta Bantuan Modal masing-

masing sebesar Rp. 5.000.000,- bagi 20 UMKM. Sasaran masing masing program adalah pada 6 kecamatan yang ada di Kota Mataram dimana di setiap Kecamatan terdapat beberapa UMKM yang aktif dalam kegiatan produksinya. Dalam program tersebut terdapat beberapa target kinerja yang ingin dicapai dalam pelaksanaan program kegiatannya yaitu seperti Terjalinnnya kerjasama/kemitraan dengan Pihak BUMN/Perbankan untuk Pengembangan dan peningkatan akses UKM, Peningkatan pengetahuan pelaku UKM tentang tata cara pengolahan pangan yang baik sehingga dapat meningkatkan nilai jual produk dan bisa menembus pangsa pasar dalam daerah maupun luar daerah, Peningkatan nilai jual produk dan kemampuan UKM dalam pengembangan usahanya, Terjalinnnya kemitraan dengan pihak BUMN untuk mempermudah dalam proses pengaksesan modal usaha bagi UKM, Peningkatan pengetahuan dan pemahaman pelaku UKM tentang tata cara manajemen usaha untuk pengembangan dan peningkatan usahanya, Peningkatan wawasan dan pengetahuan dari pelaku usaha yang ada di daerah lain untuk pengembangan usahanya, Menjalain kerjasama dengan pasar/retail modern, Memperkenalkan produk UKM agar dapat menembus pangsa pasar dalam dan luar daerah Bantuan Modal Wira Usaha Baru dan Peningkatan ,pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro dan kecil.

Pembahasan

Program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang menjadi titik sentral kajian ini merupakan pengembangan kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah untuk program pemberdayaan yang berkaitan dengan ekonomi kerakyatan dengan penggalian potensi masyarakat yang masih bisa terus dikembangkan. Cakupan kebijakan yang berhubungan dengan program pemberdayaan ekonomi kerakyatan terutama pada UMKM di Kota Mataram didominasi oleh yaitu pada Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM sekaligus sebagai leading sektor dalam pengembangan dan pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi kerakyatan Di kota Mataram. OPD yang paling dominan dalam



pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi kerakyatan ini adalah pada Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Mataram. Karena memang berdasarkan visi misinya mengarah pada upaya peningkatan ekonomi kerakyatan melalui program program pemberdayaan yang dilakukannya. Adapun analisa program program pemberdayaan ekonomi kerakyatan pada Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM dapat dijelaskan di bawah ini :

Pembangunan Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di Kota Mataram ditujukan untuk mewujudkan usaha-usaha mikro, kecil dan menengah pada sektor perindustrian, koperasi usaha kecil dan menengah yang maju, handal dan berdaya saing serta berperan sebagai tulang punggung ekonomi daerah yang berbasis pada ekonomi kerakyatan. Dengan demikian berbagai upaya yang dilakukan yaitu dengan merancang berbagai program yang mampu memberikan kontribusi kepada pembangunan Kota Mataram serta berupaya untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesempatan berusaha, membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan. Hal ini sejalan dengan Visi Kota Mataram yang menginginkan terwujudnya masyarakat Kota Mataram yang maju dan religius dan berbudaya sementara Dinas Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Mataram menetapkan Visi sebagai berikut : “Terwujudnya Peningkatan Sektor Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang Maju, Tangguh dan Mandiri”.

Dalam mewujudkan visi tersebut, dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Mataram telah melakukan berbagai macam kegiatan yang berkaitan dengan program pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan seperti yang tertera pada tabel di bawah ini :

Tabel 4. Program pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kota Mataram Tahun 2018

No	Program kegiatan	Anggaran (rp)	Capaian program	Sasaran
1	Bimtek Kemitraan	Rp. 14.895.000	100%	40 UMKM yang ada di 6 Kecamatan
2	Bimtek PIRT	Rp. 34.755.000	100%	60 UMKM yang ada di 6 Kecamatan
3	Bimtek Pengelolaan manajemen perbengkelan.	Rp. 17.895.000	100%	20 UMKM yang ada di 6 Kecamatan
4	Bimtek Pengembangan UKM dengan Pelaku Usaha	Rp. 14.845.000	100%	20 UMKM yang ada di 6 Kecamatan
5	Bimtek Pengelolaan permodalan UKM	Rp. 14.745.000	100%	20 UMKM yang ada di 6 Kecamatan
6	Bimtek Manajemen Usaha	Rp. 14.745.000	100%	20 UMKM yang ada di 6 Kecamatan
7	Magang bagi UKM	Rp. 98.000.000	100%	12 Orang Pelaku UMKM
8	Bimtek Manajemen Usaha pasca SHAT	Rp. 13.215.000	100%	20 UMKM yang ada di 6 Kecamatan
10	Bimtek Kewirausahaan	Rp. 13.215.000	100%	20 UMKM yang ada di 6 Kecamatan
11	Pameran dan Promosi	Rp. 103.000.000	100%	12 orang peserta dan pendamping

Sumber : Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Mataram

Pada tahun 2018, Dinas perindustrian, koperasi dan UKM, masih terdapat konsistensi program yang dirasakan masih sangat dibutuhkan dalam upaya memberdayakan ekonomi masyarakat di Kota Mataram. Hal ini bisa dilihat dari program yang secara garis besarnya merupakan program Bimtek, baik itu untuk manajemen, pemasaran, kewirausahaan serta bimtek bimtek lain yang mampu mengakomodir kebutuhan pendampingan masyarakat yang ada di Kota Mataram. Sementara itu berdasarkan sasaran atau objek yang akan diberikan pendampingan atau bimtek selalu konsisten seiring bertambahnya wirausaha baru yang setiap waktu terus bertambah dan bahkan selalu di update oleh pemerintah kota mataram melalui dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Mataram. Dari segi anggaran yang paling besar terserap adalah pada kegiatan pameran dan promosi Rp. 103.000.000 serta pada kegiatan magang bagi UKM sebesar Rp. 98.000.000, pada tahun 2018. Pengenalan produk lokal secara



nasional juga gencar dilakukan oleh dinas perindustrian dan koperasi serta UKM baik melalui jejaring media sosial maupun secara konvensional. Pada objek yang dijadikan sasaran dalam setiap kegiatan ini juga bervariasi tergantung pada besarnya atau banyaknya kebutuhan yang ditemukan dilapangan. Kebutuhan yang paling banyak ditemukan adalah untuk kegiatan Bimtek PIRT. Sasarannya pada Ibu ibu rumah tangga yang berusaha membantu perekonomian keluarga secara internal sehingga banyak yang dijadikan sebagai objek atau sasaran kegiatan pada Dinas Perindustrian , koperasi dan UKM.

Sementara itu capaian pada masing masing program berdasarkan data yang diperoleh, pada Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM pada tahun 2018 rata rata mencapai 100%. Ini menunjukkan bahwa program yang dijalankan pada dinas perindustrian, koperasi dan UMKM memenuhi target yang ingin dicapai.

Analisis Permasalahan, kendala pencapaian Efektifitas dan efisiensi serta strategi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan

Untuk mendorong terlaksananya Program dengan baik di Kota Mataram agar tetap sasaran berdasarkan target kinerja yang diharapkan pada setiap tahunnya maka perlu diketahui analisis permasalahan, kendala pencapaian dan strategi pelaksanaan dalam pencapaian efektivitas dan efisiensi program pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui mekanisme perencanaan, pelaksanaan dan monev yang dilakukan pada sistem, kelembagaan dan SDM dan finansial.

Analisa ini juga tidak terlepas dari besaran anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang ada pada setiap OPD khususnya pada Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM. Dalam pelaksanaan program setiap OPD menemukan permasalahan yang variatif atau beraneka ragam bentuknya. Berdasarkan hasil data dan analisa yang dilakukan bahwa pada Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM dihadapkan pada permasalahan seperti jenis usaha yang jalankan oleh UMKM. Pada awal pendataan UMKM

melaporkan jenis usaha namun ketika didata ulang atau di monitoring yang terjadi justru UMKM sudah mengganti usaha dengan usaha lain dengan alasan bahwa usaha barunya tersebut yang sedang banyak dibanjiri oleh para konsumen. Selain itu permasalahan lain yang juga ditemukan adalah usaha yang ditemukan tidak terlalu cepat perkembangannya atau perkembangannya lamban, dan para pelaku usaha masih mengandalkan pasar konvensional. Dari sisi anggaran Dinas Perindustrian, koperasi dan UMKM menjadikannya sebagai permasalahan yang relative ada pada setiap pelaksanaan programnya.

Munculnya permasalahan ini disebabkan oleh pola pikir masyarakat yang selalu mengikuti trend sehingga memudahkan mereka untuk mengganti jenis usahanya menjadi berbeda dari jenis usaha yang dilaporkan sebelumnya. Selain itu penyebab permasalahan yang lainnya adalah karena kuram maksimal pemahaman pelaku usaha pada penyerapan dan penggunaan IT secara maksimal akibatnya mengandalkan sistem penjualan yang masih bersifat konvensional.

Berangkat dari permasalahan ini maka strategi yang dilakukan adalah dengan melakukan pendekatan analisa perilaku konsumen dan permintaan pasar, Sosialisasi, memaksimalkan pelaksanaan bimtek baik untuk kemudahan dalam mendapatkan modal usaha bagi UMKM maupun bimtek penggunaan IT secara maksimal. Serta memberikan pemahaman bahwa masyarakat sadar ada sebuah lembaga yang mampu memfollow-up usaha yang dijalankannya agar menjadi berkembang dan mandiri. Strategi pelaksanaan dapat dilakukan melalui mekanisme yang dilakukan dalam tahapan sebagai berikut:

- 1) Melakukan pemetaan potensi, pendataan dan kebutuhan masyarakat di 6 kecamatan yang ada di kota mataram untuk memperoleh gambaran jumlah UMKM yang belum berkembang, yang membutuhkan pembinaan dan keterampilan serta pembinaan kebutuhan akses modal. Pendataan ini berfungsi untuk menggali kebutuhan masyarakat



sekaligus untuk mensosialisasikan keberadaan lembaga yang bisa membantu pelaksanaan pengembangan usaha bagi pengusaha kecil atau rumah tangga.

- 2) Hasil pendataan dapat dijadikan sebagai sasaran objek dalam pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang ada di pemerintahan daerah Kota Mataram.
- 3) Menyesuaikan program pemberdayaan ekonomi kerakyatan di setiap OPD dengan kebutuhan masyarakat khususnya yang menjalankan usaha kecil atau UMKM.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Minimnya anggaran menyebabkan kegiatan yang dilaksanakan pada OPD tidak berjalan secara maksimal.
2. Pada Umumnya OPD telah memberikan pembinaan kepada sasaran atau penerima manfaat dari program tersebut namun dipandang belum efektif akibat terbatasnya kualitas dan kuantitas sumberdaya (Finansial dan SDM)
3. Terciptanya kontinuitas kegiatan atau program dipandang mampu memberikan daya ungkit terciptanya efektivitas program pemberdayaan ekonomi di masyarakat.

Saran

1. Meningkatkan kegiatan yang menunjang berkembangnya semangat kewirausahaan seperti pelatihan, studi banding dan even even promosi berbasis ekonomi kerakyatan program kegiatan yang berhubungan dengan perekonomian kerakyatan.
2. Pelaksanaan kegiatan atau program pemberdayaan dengan didasari sosial mapping untuk menjawab kebutuhan masyarakat melalui analisa perilaku konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] BPS Provinsi NTB, Mataram dalam angka 2018. Mataram
- [2] Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Penerjemah: Samodra Wibawa. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- [3] Mahidin, Eddy. (2006). *Pemberdayaan Perempuan Miskin Pada Usaha Kecil di Perdesaan Melalui Layanan Lembaga Keuangan Mikro*. www.ugm.ac.id.
- [4] Perda No 3 tahun 2014 tentang pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- [5] PP No 32 tahun 1998 tentang pengembangan dan pembinaan Usaha Kecil
- [6] Rukminto, Bachtiar. (2008). *Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Program Pengembangan Labsite Pemerdayaan Masyarakat*. (Online). www.ejournal.unair.ac.id.
- [7] Sumodiningrat, G .1996. *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- [8] UU No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah